

Pendidikan Budaya dan Budaya Pendidikan

Oleh Sermada Kelen Donatus* – Malang

Abstract:

The Title "*Pendidikan Budaya dan Budaya Pendidikan*" (*Formation of the Culture and Culture of the Formation*) contains two concepts which are different from each other. Formation of the culture is dealing with the formation touching the culture. The formation is emphasizing the process of creating the guidelines to develop and to put forward the culture. It involves the process of knowing, cultivating and of developing the essence of the culture. Culture of the formation is the practice of the formation. It means the whole activities that include the styles, the behaviours, the attitude and the way of life, the instruments, the practical concepts, the administration and the management of the education, the ideology and the philosophy of the education. In other words, culture of the formation is dealing with the question of how a formation or education should be done. The author has an effort to elaborate the two concepts in the different meaning, and at the end of this article, the author would like to apply these two different concepts to the Indonesian context nowadays.

Kata-kata kunci: pendidikan budaya, budaya pendidikan, *cultural studies*, wujud budaya, model pendidikan, kurikulum pendidikan

1. Pengantar

Pendidikan Budaya dan Budaya Pendidikan merupakan dua konsep yang berbeda. Penulis mencoba menelusuri konsepnya yang berbeda itu dalam terang "studi-studi budaya" (*cultural studies*). Untuk itu kita perlu menyimak lebih dahulu apa yang kita maksudkan dengan "studi-studi budaya", agar supaya kita tidak dengan serta merta mengidentifikasikannya dengan "Anthropologi Budaya".

Studi-studi budaya dewasa ini diusahakan sebagai satu disiplin ilmu yang bidang-bidangnya adalah jaringan ilmu-ilmu atau bidang "interdisipliner". Bidang ini dipilih dari antara berbagai disiplin ilmu, dan dari disiplin-disiplin ilmu yang

* Penulis adalah dosen filsafat di STFT Widya Sasana, Malang; direktur Pusat Pengkajian Agama dan Kebudayaan Aditya Wacana, Malang; sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Airlangga, Surabaya.

dipilih itu dikaji “ hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan” (Chris Barker, 2009:7-8). Mengapa disiplin ini masih diusahakan sebagai satu “disiplin ilmiah”. Alasannya ialah bahwa hingga saat ini disiplin “studi-studi budaya” tidak memiliki satu wilayah subyek yang didefinisikan secara jelas (Sandi, 2011: 27-31). Bidangnyanya sangat luas dan mencakup segala hal: teori-teori seperti teori feminis, teori sastra, teori media dan teori-teori lain, sejarah, filsafat, ekonomi, politik, pendidikan, seni dan sebagainya. Karena itu, pendekatan terhadapnya bersifat holistik, karena menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan hasil karya manusia. Ada ilmuwan yang menyimpulkan bahwa studi-studi budaya adalah satu usaha untuk

memahami bagaimana makna diarahkan, disebarkan, dan dihasilkan dari berbagai macam praktik-praktik budaya, kepercayaan, institusi, struktur ekonomi, politik, dan sosial yang di dalamnya ada aspek yang dikaji dari budaya (Sandi, 2011:29).

Ada yang mengatakan secara sederhana bahwa “studi-studi budaya” adalah satu deskripsi pengalaman manusia.

Dalam hubungan dengan tema kita tentang “Pendidikan Budaya dan Budaya Pendidikan”, kita menyoroti dua bidang penting dalam perspektif “studi-studi budaya”, yaitu bidang pendidikan budaya dan bidang budaya pendidikan. Kita menelusuri konsep teoretis “Pendidikan Budaya” lalu pada bagian berikut bidang “Budaya Pendidikan”, dan pada bagian terakhir kita aplikasikan pemahaman tentangnya pada konteks Indonesia dewasa ini.

2. Pendidikan Budaya

Pendidikan budaya terfokus pada pendidikan yang menyentuh budaya. Kita menitikberatkan proses pendidikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan. Konsep pendidikan sendiri dalam studi ilmu-ilmu sosial bermacam-macam sesuai dengan aliran filsafat yang melatarbelakanginya. Di sini kita boleh mengangkat konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berkata bahwa

pendidikan itu hanya suatu ‘tuntunan’ di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri (2009:3).

Kata kunci yang digariskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk melukiskan konsep pendidikan adalah “tuntunan”. Si Pendidik adalah orang yang menuntun anak didik. Ketika kita mengaitkan konsep pendidikannya dengan kebudayaan,

maka kita dengan sederhana mengatakan bahwa pendidikan budaya adalah tuntunan untuk memahami dan mendalami budaya.

Bila pendidikan budaya berkonsentrasi pada proses penuntunan terhadap budaya, maka patutlah kita perlu memahami dan mendalami apa saja yang termasuk dalam bidang budaya. Satu definisi tentang budaya perlu dikemukakan.

Kita mengawali pemahaman kita tentang budaya dengan berangkat dari arti etimologis kata “budaya” dan kata bahasa Inggris “culture”. Kata “budaya” berasal dari kata benda bahasa Sanskerta jenis Feminin “*Buddhi*” yang berarti kebajikan, kepandaian, akal budi (Delavan Perry, 1990:57-58;206). Bentuk plural Nominatif kata “*Buddhi*” adalah “*buddhayas*”, yang berarti kebajikan-kebajikan, kepandaian-kepandaian.

Tentu dalam perjalanan sejarah penggunaan kata ini, lebih-lebih ketika pada zaman Sankretisasi di bumi Indonesia pada awal abad Masehi, pengertian kata ini sudah diperluas dan mengacu pada segala sesuatu yang merupakan hasil kepandaian manusia. Itulah „kebudayaan”. Sementara itu, kata bahasa Inggris “culture” berasal dari kata benda bahasa Latin jenis Feminin “*Cultura*”, tetapi kata benda ini berakar dari kata kerja infinitif konyugasi ketiga “*colere*” yang berarti mengolah, mengerjakan tanah, menanam. Kata “*cultura*” lalu berarti pengolahan tanah, penanaman. Arti figuratif “*cultura*” adalah pendidikan, penggemblengan, dan arti religius “*cultura*” adalah pemujaan, penyembahan (Print, 1969:151; 267). Arti etimologis yang mengacu pada bidang pertanian diperluas. Bukan hanya bidang pertanian, tetapi segala bidang kehidupan manusia yang menjadi bidang kebudayaan. Kebudayaan lalu meliputi teknik atau cara-cara pengolahan hidup manusia dan juga meliputi hasil pengolahan atau hasil karya manusia itu sendiri.

Dari penelitian ilmu-ilmu empiris, banyak definisi tentang kebudayaan dikemukakan. Tetapi dalam konteks kita, kita mengangkat konsep Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan. Kebudayaan menurutnya adalah cara pengolahan cipta, rasa dan karsa manusia (Suparto Rahardjo, 2010:70-71) dan sekaligus juga hasil pengolahan cipta, rasa dan karsa manusia. Cipta berhubungan dengan kemampuan akal budi, rasa berhubungan dengan kemampuan rasa, dan karsa berhubungan dengan kemampuan jiwa yang mendorong manusia untuk berniat atau berkehendak.

Ketika manusia mengolah daya akal budi, ketika manusia mengolah daya rasa dan ketika manusia mengolah daya jiwa yang memberi motivasi, maka manusia justru menciptakan kebudayaan. Tetapi pengolahan cipta, rasa dan karsa manusia tidak berhenti pada proses pengolahan ketiga elemen kunci itu.

Kebudayaan menunjuk juga pada hasil dari pengolahan ketiga elemen itu dalam diri manusia. Karena itu, konsepnya yang utuh tentang kebudayaan ialah bahwa kebudayaan itu adalah pengolahan dan hasil pengolahan daya cipta, daya rasa dan daya karsa dalam diri manusia untuk kepentingan diri, untuk kepentingan sesama bangsa baik sesama warga maupun sesama umat manusia di dunia, dan untuk kepentingan dunia (Konsep Trihayu).

Ki Hajar Dewantara mengemukakan gagasannya tentang kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional Indonesia adalah sari dari kebudayaan daerah yang ada dalam negara Indonesia. Konsep ini tampak agak berat sebelah, karena orang akan mempertanyakan kedudukan kebudayaan yang datang dari luar dan yang sudah terintegrasi ke dalam kebudayaan nasional. Dewasa ini kebudayaan nasional merupakan sari kebudayaan daerah dan kebudayaan dari luar, dan sari kebudayaan seperti ini lahir oleh karena kemampuan manusia Indonesia sendiri yang dikembangkan dengan cara-cara yang bersifat kontinu, konvergen dan konsentris.

Ki Hajar Dewantara menyebutnya “konsep Trikon”, yaitu kontinuitas, konvergensi dan konsentris (Suparto Rahardjo, 2010:70). Kontinuitas berarti proses pelestarian budaya-budaya daerah; konvergensi berarti proses perpaduan budaya-budaya baik budaya-budaya daerah maupun budaya-budaya yang datang dari luar, dan konsentris berarti proses pemusatan pada penciptaan budaya baru yang merupakan hasil perpaduan dari budaya-budaya yang ada di Indonesia.

Sesudah kita menelusuri arti budaya, kita mencoba menjelaskan arti pendidikan budaya sebagai proses penuntunan terhadap budaya. Pendidikan budaya sebagai proses penuntunan terhadap budaya dimaksudkan “proses pengenalan, pemeliharaan, dan pengembangan wujud-wujud kebudayaan” (Tilaar, 1999:86).

Koentjaraningrat mengartikulasikan wujud-wujud budaya dalam tiga hal: 1. Keseluruhan gagasan, pikiran, konsep, ide tentang hidup bermasyarakat dan dalam hidup bermasyarakat; 2. Keseluruhan aktivitas atau kegiatan manusia dalam hidup bermasyarakat; 3. Benda-benda hasil karya manusia. Manusia mengenal, memelihara atau melestarikan serta mengembangkan wujud-wujud budaya tersebut melalui pengolahan terhadap kemampuan “cipta, rasa, dan karsa” manusia sendiri. Itulah proses pendidikan budaya.

Bila kita kaitkan konsep Ki Hajar Dewantara tentang arti kebudayaan dan konsep Koentjaraningrat tentang wujud kebudayaan, kita boleh menyimpulkan bahwa pendidikan adalah salah satu aspek kebudayaan itu sendiri yang mencerminkan aktivitas atau kegiatan manusia.

Untuk melukiskan bagaimana pendidikan budaya itu diwujudkan dalam hidup, kita mengangkat hasil studi Erikson tentang riset lapangannya pada suku Indian Sioux di Dakota Selatan, Amerika Serikat (Erikson, 2001:42-44). Tugas Erikson ialah mempelajari segala metode tradisional bagaimana suku Indian mengasuh dan mendidik anak-anak mereka dan bagaimana dampak pendidikan formal yang dibawa dari Barat dialami anak-anak suku ini.

Sebelum kedatangan orang Eropa ke Amerika, suku Indian Sioux adalah suku pengembara. Mereka dikenal sebagai pejuang berani yang berada di atas kuda tunggangannya dan pemburu binatang bison. Nilai budaya mereka yang sangat dijunjung tinggi adalah watak berani, semangat juang yang tinggi, bangga terhadap kebebasan dan kemerdekaan hidup yang mereka miliki dan bermurah hati. Metode pendidikan tradisional mereka adalah melatih anak-anak mereka untuk memiliki watak dan menghayati nilai-nilai warisan nenek moyang mereka seperti yang disebut terakhir. Setiap anak Sioux dibina dan dibentuk menurut pola dan cita-cita hidup sukunya. Anak-anak dilatih untuk mengendarai kuda, trampil berburu dan meresapkan nilai keberanian, kebebasan dan otonomi diri, percaya diri, semangat juang yang tinggi, daya tahan yang kuat dan terlebih bersikap murah hati. Semangat penumpukan harta dan persaingan yang dibawa oleh kebudayaan barat sungguh bertentangan dengan keutamaan murah hati. Setiap hasil buruan dibagikan kepada sesama tanpa berkonflik tentang siapa yang harus memiliki lebih. Keberhasilan pendidikan anak-anak diukur menurut keberhasilan penanaman nilai-nilai tersebut.

Ketika pendidikan formal yang dibawa dari Barat diberi kepada anak-anak suku ini melalui satu program sekolah pemerintah yang disebut "*Indian Service*", Erikson mengamati bahwa anak-anak suku ini bersikap fatalistis dan acuh tak acuh terhadap program ini. Anak-anak bolos dari sekolah, dan hal itu dipandang biasa. Mereka mengisolasi diri dan apatis. Erikson dalam pengamatannya mencoba memberi jawaban mengapa anak-anak suku ini bersikap demikian. Erikson menjelaskan dalam penelitian psikologisnya bahwa anak-anak Indian Sioux terperangkap dalam dilema besar yang tidak mampu mereka atasi. Mereka berada di dalam dilema antara menghayati nilai-nilai keberhasilan yang diwariskan oleh tradisi nenek moyangnya atau nilai keberhasilan bangsa kulit putih yang disalurkan lewat sekolah formal untuk belajar membaca, menulis dan menghitung. Kebanyakan mereka lebih suka mengisolasi diri dari pada berkonfrontasi dengan model pendidikan yang resmi. Mereka secara tidak sadar kehilangan identitas diri, karena seluruh warisan nilai budaya sukunya tidak bisa diwujudkan dalam realitas pendidikan modern yang mengutamakan persaingan dan kekuatan ekonomi.

Dari contoh itu, kita menemukan bahwa pendidikan budaya tidak hanya diterapkan lewat pendidikan formal. Pendidikan tradisional anak-anak suku Indian Sioux termasuk juga dalam salah satu bentuk pendidikan budaya. H. A. Tilaar menyebut tiga model pendidikan yang berlaku juga untuk pendidikan budaya. Pendidikan meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal (Tilaar, 1999:86-87).

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dijalankan secara resmi lewat institusi-institusi resmi yang diatur pemerintah seperti TK, SD, SMP, SMA, Universitas, sekolah-sekolah kejuruan, pendidikan jarak jauh (*Cyberlearning*). Tiga wujud budaya yang disebutkan di atas dijabarkan dalam kurikulum resmi yang memberi pedoman untuk memperkenalkan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar sekolah dan dikenal dalam masyarakat seperti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, workshop atau lokakarya, sarasehan, seminar, dan sebagainya. Kursus-kursus pertukangan dan lokakarya tentang pendidikan seksualitas untuk para remaja seperti yang akan kami jalankan pada bulan Oktober 2012 dan berbagai macam lokakarya lain merupakan bentuk pendidikan budaya non-formal.

Pendidikan informal adalah pendidikan yang dijalankan secara tradisional lewat adat kebiasaan, kehidupan konkret masyarakat, media massa dan perpustakaan. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat diresapkan lewat kehidupan konkret masyarakat, media massa atau buku-buku yang membahas nilai-nilai itu. Pendidikan budaya dalam model informal ini dipraktekkan dengan cara-cara yang tidak digariskan secara sistematis.

3. Budaya Pendidikan

Sebelum kita menjelaskan arti budaya pendidikan, kita perlu mengemukakan fakta-fakta empiris yang memperlihatkan praktek pendidikan. Dalam sejarah pendidikan, kita mengenal beberapa sistem pendidikan formal, yaitu sistem asrama dalam tradisi Hindu, sistem pesantren dalam tradisi Islam, sistem pendidikan seminari dalam tradisi Kristen, dan sistem pendidikan sekular dalam tradisi modern. Praktek pendidikan dalam asrama, pesantren, seminari adalah praktek pendidikan agama, sementara praktek pendidikan sekular adalah praktek pendidikan humanis yang tidak mutlak berkaitan dengan pendidikan agama.

Praktek pendidikan asrama dalam tradisi Hindu pada masa Upanishad (1500-500 seb.M) dan Mahabharata (circa 1400 seb.M.) dijalankan dengan

cara duduk bersila di hadapan seorang guru. Pada waktu yang ditentukan datanglah murid-murid menghadapi gurunya dan duduk di sekitar guru. Guru biasanya adalah seorang resi (penglihat), karena dia mempunyai kemampuan khusus melihat apa yang diwahyukan oleh dewa kepadanya dan mendengar apa yang disabdakan dewa kepadanya. Apa yang dilihat dan didengar oleh para resi sudah termuat dalam tulisan-tulisan suci, termasuk Kitab Veda. Guru mengucapkan ayat-ayat suci dan mendaraskannya, lalu murid-murid mendengar dan mengulang mendaraskan ayat-ayat itu secara teliti dan tepat. Murid-murid tidak hanya mengulang mendaraskannya, tapi juga menempatkannya dalam ingatan dan menghayatinya untuk mendapatkan pembebasan. Pendidikan asrama pada masa ini hanyalah jenjang hidup awal yang harus ditempuh oleh seorang Hindu.

Jenjang hidup ini adalah jenjang hidup guru-murid (*brahmacarin*), dan sesudah jenjang ini, orang harus masuk ke jenjang wajib nikah (*grehasta*), dan sesudah jenjang ini, haruslah ditempuh jenjang pengembaraan di hutan untuk mencari ketenangan (*vanaprasta*), dan jenjang terakhir adalah jenjang meditasi untuk mendapatkan ketenangan dan pembebasan (*saniasin*) (Klostermaier, 1994:336-337).

Pendidikan pesantren dalam tradisi Islam di Indonesia termasuk satu dari tiga lembaga pendidikan dasar agama Islam. Tiga lembaga pendidikan dasar itu adalah pengajian Qur'an, studi pada pondok pesantren dan pendaftaran pada sekolah "madrassa" (Robert Hefner, 2009:55-62).

Pengajian Qur'an biasanya dilaksanakan pada sore hari untuk anak-anak sekitar usia 6 sampai 11 tahun. Mereka diberi instruksi bagaimana membaca teks Qur'an dan mendaraskannya dan mencoba memahaminya secara sederhana. Pendidikan ini dipandang sebagai pelengkap untuk pendidikan umum yang diwajibkan negara. Karena itu, kegiatan ini dilakukan di luar jam sekolah resmi dan biasanya mengambil tempat di mesjid, langgar, mushola, atau rumah pribadi dari guru agama. Pendidikan pada pondok pesantren bertujuan untuk meresapkan tradisi pengetahuan islam ke dalam anak didik. Pondok pesantren adalah semacam asrama, satu bentuk sekolah penampungan (*boarding school*) yang diperuntukkan baik bagi pria maupun bagi perempuan yang berusia remaja.

Di Indonesia diperkirakan terdapat 11.000 pesantren yang mendidik sekitar 2,9 juta mahasiswa/i yang kebanyakan sudah menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pesantren memiliki kurikulum sendiri yang bersertifikat; maksudnya, mahasiswa/i tinggal untuk satu jangka waktu yang lama di tempat itu dan menyelesaikan beberapa program kurikulumnya yang

berujung pada perolehan sertifikat atau ijazah. Isi kurikulum sebagian besar adalah pengetahuan agama dan sebagian kecil pengetahuan profan.

Pendidikan dasar ketiga yang disebut madrasa adalah pendidikan dasar Islam sebelum memasuki sekolah pesantren. Di sana diberikan pelajaran campuran, yaitu pelajaran agama dan pelajaran umum. Para guru sudah diberi gaji. Ruangan kelas dibangun sama seperti ruangan kelas pada sekolah dasar negeri. Cara mengajar adalah berupa instruksi-instruksi yang diberikan kepada anak didik oleh para guru yang berijazah agama. Ada juga siswa yang mengikuti sekolah madrasa, tetapi tinggal di pondok pesantren. Sekolah madrasa tidak hanya berlaku untuk pendidikan dasar dan menengah seperti untuk anak-anak SD, SMP dan SMA.

Pendidikan Seminari dalam tradisi Kristen Katolik adalah pendidikan untuk menjadi imam Katolik. Pendidikan model ini terdiri dari pendidikan Seminari Menengah dan Pendidikan Seminari Tinggi. Para calon imam ditampung di asrama dan dari waktu ke waktu disileksi secara ketat sesuai dengan kriteria dan pedoman umum yang berlaku di seluruh dunia untuk pendidikan seorang imam Katolik.

Kriteria dan pedoman umum itu adalah tiga S, yaitu *Sanctitas* (kekudusan), *Sapientia* (kepandaian, kebijaksanaan) dan *Sanitas* (kesehatan). *Sanctitas* berhubungan dengan pembentukan watak dan sikap rohaniah seperti kejujuran, ketulusan dan kebajikan lain; *Sapientia* berhubungan dengan kepandaian yang diukur melalui nilai akademis dari fak-fak yang diterima di sekolah; *Sanitas* berhubungan dengan kesehatan jasmani. Bila satu dari tiga kriteria (tiga S) itu tidak dipenuhi, maka si calon harus dikeluarkan dari panti pendidikan ini dan dinyatakan tidak layak untuk maju terus.

Aturan harian diatur secara rapih dengan mengacu pada alur "*Ora et Labora*" (Berdoa dan Bekerja). Ada waktu untuk doa dan diam (*silentium*), ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk rekreasi dan ada waktu untuk sekolah. Di Seminari Menengah, pendidikan akademis mengikuti kurikulum nasional yang dilengkapi dengan tuntutan khusus pendidikan imam seperti bahasa Latin, pelajaran Kitab Suci, agama, liturgi dan sebagainya. Guru-guru di pendidikan Seminari Menengah terdiri dari para imam, Bruder, para awam dan juga suster. Ketika seseorang ditemukan "nyontek", dia segera dikeluarkan dan dinyatakan "tidak layak" untuk melanjutkan studi di tempat itu. Bila seseorang ditemukan tidak sehat karena ada penyakit warisan, dia dinyatakan juga tidak layak. Bila seseorang memukul orang lain dengan kekerasan, dia juga terus dikeluarkan dari Seminari. Pendidikan di Seminari adalah satu pendidikan yang ketat, disiplin dan religius.

Pendidikan dalam tradisi sekuler kini dijalankan di seluruh dunia dan lahir dari tradisi pendidikan religius (Seminari dan pendidikan kebiaraan) di Eropa. Pendidikan semacam ini tidak selamanya berorientasi pada pembentukan hidup religius, tetapi pada pembentukan kecerdasan, kemanusiaan, ketrampilan dan keahlian di bidang tertentu (pendidikan humanis). Universitas-universitas didirikan dan ditata menurut fakultas-fakultas yang mengkomposisikannya, seperti fakultas hukum, fakultas kedokteran, fakultas filsafat, fakultas pendidikan, fakultas ilmu sosial dan politik dan sebagainya.

Institusi-institusi resmi sejak dari sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi ditangani oleh negara dan swasta, yang keduanya tidak perlu dikaitkan dengan soal-soal agama. Praktek pendidikan menengah kini di Indonesia mengacu pada pendidikan kejuruan, yang terdiri dari IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan Matematika. Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta yang bergerak di bidang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah beroperasi menurut kurikulum nasional, sementara sekolah-sekolah swasta masih menambahkan bidang-bidang tertentu yang menjadi kekhasannya.

Kini di Eropa terdapat persoalan yang sedang didiskusikan ialah menyangkut pendidikan agama dalam sekolah-sekolah negeri. Apakah pendidikan agama perlu dalam sekolah-sekolah negeri dan apakah pendidikan agama bisa diganti saja dengan pendidikan "Budi Pekerti" yang berdiri netral di atas semua agama.

Setelah melihat beberapa fakta empiris tentang sistem dan praktek pendidikan, kita mencoba melukiskan apa yang kita maksudkan dengan budaya pendidikan. Budaya pendidikan sebetulnya adalah praktek pendidikan itu sendiri. Itu berarti seluruh kegiatan yang melibatkan semua cara, tingkah laku, sikap dan cara hidup, alat, konsep praktis, administrasi dan manajemen pendidikan, falsafah hidup dan ideologi; semuanya yang berurusan dengan pertanyaan tentang bagaimana satu pendidikan dijalankan. Seluruh kegiatan itu bolehlah dipandang sebagai budaya pendidikan.

Pandangan H. A. R. Tilaar, ketika dia menulis: "*Kebudayaan pendidikan (educational culture) merupakan gagasan, konsep, yang mendasari praksis pendidikan*" (1999:103), adalah berat sebelah, karena kebudayaan tidak hanya berupa konsep atau gagasan, tapi juga praktek hidup, yang dalam konteks pendidikan adalah praktek pendidikan itu sendiri. Kegiatan belajar-mengajar yang ditemukan dalam semua sistem pendidikan adalah salah satu bagian dari budaya pendidikan.

Jerome Bruner, seorang psikolog dan pedagog Amerika Serikat, mengemukakan empat jenis pandangan pedagogis, yang membantu kita untuk memahami budaya pendidikan (Tilaar, 1999:104-105).

Pertama, pandangan internalis berpendapat bahwa proses pendidikan yang baik berpusat pada usaha untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dikerjakan oleh anak didik.

Kedua, pandangan eksternalis berkonsentrasi pada usaha untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dikerjakan oleh pendidik terhadap anak didik dalam proses belajar-mengajar.

Ketiga, pandangan intersubyektif menekankan proses interaksi antara pendidik dan anak didik dan antara anak didik dan anak didik dalam proses belajar-mengajar.

Keempat, pandangan obyektivistis menekankan bahwa anak didik adalah seperti sekawanan semut atau sekawanan domba yang dituntun oleh pendidik. Tetapi keempat jenis pandangan ini tidak dipisahkan satu sama lain. Budaya pendidikan justru meliputi keempat jenis pandangan itu yang diterapkan dalam praktek secara tidak terpisah.

4. Pendidikan Budaya dalam Konteks Indonesia Kini

Bila kita memahami pendidikan budaya sebagai proses penuntunan terhadap budaya, maka dalam bagian ini kita mencoba mencermati proses penuntunan terhadap budaya nasional dalam konteks Indonesia masa reformasi dari tahun 1998 hingga saat ini. Kebudayaan nasional sudah kita rumuskan sebelumnya ketika kita mengemukakan konsep Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan nasional. Hal yang hendak kita cermati di sini adalah soal apakah pendidikan budaya dalam arti proses pengenalan, pelestarian dan pengembangan budaya nasional termaktub dalam kebijakan nasional sehubungan dengan kurikulum pendidikan dan apakah kenyataan sosial bangsa secara konkrit mencerminkan adanya proses pendidikan semacam itu.

Kurikulum pendidikan dalam era reformasi ini adalah kurikulum tahun 2004 dan kurikulum tahun 2006/2007. Kurikulum 2004 dikenal dengan nama "Kurikulum Berbasis Kompetensi" (KBK) (Muhammad Rohman, 2012:75-101). Dalam kurikulum ini, para murid tidak lagi mengikuti sistem caturwulan (cawu) seperti pada kurikulum Orde Baru tahun 1994, tapi sistem semester. Tahun ajaran terdiri dari dua semester: semester ganjil dan semester genap.

Kekuatan dari kurikulum ini ialah bahwa murid tidak hanya menerima isi materi pelajaran yang diajarkan guru, tetapi secara aktif mengembangkan

ketrampilannya sendiri yang berhubungan dengan IPTEK (Ilmu Pengetahuan Tekhnik), meskipun guru tetap menuntunnya. Peran guru hanyalah fasilitator. Para siswa tidak dipandang sebagai obyek yang ke dalamnya dipompakan isi bahan pelajaran oleh guru. Murid berinisiatif dan berkreasi sendiri dalam penuntunan. Murid adalah subyek pendidikan, bahkan dalam arti tertentu murid juga “mendidik” guru (Paulo Freire, 1999:186-200).

Latar belakang mengapa kurikulum ini dikeluarkan dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal yang menantang bidang pendidikan dewasa ini untuk membenah diri dalam pengelolaannya. Faktor eksternal dapat kita temukan dalam proses globalisasi yang bercirikan revolusi di bidang IPTEKS (Ilmu, Tekhnologi dan Seni). Proses ini berdampak kuat pada bidang pendidikan untuk menyikapinya secara aktif dan bertanggung jawab agar pendidikan berjalan sesuai dengan tuntutan zaman. Faktor internal terletak dalam proses manajemen lembaga pendidikan dan mekanisme pendanaan terhadap pendidikan baik dari pemerintah maupun dari orang tua dan swasta. Faktor ini menuntut adanya kwalifikasi dan kompetensi.

Kurikulum ini memberi ruang lebar bagi pendidikan budaya, karena bidang ini yang pemahamannya dikerdilkan sebatas bidang estetika (kesenian, adat istiadat, upacara, tarian, seni suara, wayang dan lain lain) tidak mendapat perhatian kuat pada kurikulum Orde Baru 1994 (Muhammad Rifai, 2011:169-170). Syukur, kebudayaan dalam arti yang sempit itu telah dipadukan dalam kementrian “Pendidikan dan Kebudayaan” dan bukannya “Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata”.

Kita melihat kurikulum 2006/2007 yang dipandang sebagai penyempurnaan kurikulum 2004. Kurikulum ini disebut “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan” (KTSP). Kurikulum ini terdiri dari “tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus” (Muhammad Rohman, 2012:103).

Konsep dasar kurikulum ini dijabarkan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 36 ayat 1 dan 2. Isi dari Undang-Undang itu adalah bahwa kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan pengembangan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan berpegang pada prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum tersebut lalu menjadi satu strategi untuk mewujudkan satu sekolah “yang efektif, produktif dan berprestasi”. Standar nasional pendidikan adalah kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi.

Ketika konsep dasar itu disesuaikan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dan ketika design kurikulumnya dibentuk, maka tampak pada kita karakteristik penerapan kurikulum itu (Muhammad Rohman, 2012:107). Karakteristik *pertama* adalah karakter kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Maksudnya, kurikulum dengan orientasi ini memuat mata pelajaran yang harus diikuti oleh anak didik (peserta didik), dan keberhasilan diukur berdasarkan kemampuan murid untuk menguasai mata pelajaran yang bersangkutan.

Karakteristik *kedua* adalah karakter kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Kurikulum ini memberi ruang lebar aktivitas murid untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai macam pendekatan dan strategi yang disarankan. Watak murid untuk ingin tahu melalui usaha pencaharian dan penemuan hal baru ditempa.

Karakteristik *ketiga* adalah karakter kurikulum yang menyiapkan akses untuk masuk ke dalam perjumpaan dengan kepentingan daerah dan muatan lokalnya. Potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dalam lingkungannya menjadi sasaran perhatian pembentukan kurikulum. Bahasa daerah dan kekhasan budaya setempat dimasukkan ke dalam kurikulum.

Karakteristik *keempat* adalah karakter kurikulum teknologis. Artinya, kurikulum memuat program pembentukan kompetensi yang berhubungan dengan penguasaan teknologi. Sejumlah perilaku yang menjadi indikasi untuk pemilikan kompetensi di bidang teknologi bisa diukur melalui standar kompetensi.

Pertanyaan yang hendak kita jawab adalah di mana tempat pendidikan budaya dalam kurikulum pendidikan 2004 dan kurikulum 2006/2007. Dalam „Kompas”, Selasa, 4 September 2012 terdapat judul “*Arah Kurikulum Belum Jelas. Pendidikan Harus Sesuai dengan Kebutuhan Bangsa*” (Kompas, 2012:12). Seorang praktisi pendidikan dari Universitas Paramadina, Muhammad Abdulzen, berpendapat bahwa dewasa ini arah pembangunan nasional tidak jelas, dan hal ini mempersulit penentuan arah kurikulum yang bertujuan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang unggul. Arah kurikulum tidak dapat ditentukan dengan jelas. Penyelenggaraan pendidikan dewasa ini senantiasa diboncengi oleh kepentingan politik, dan karena itu penyusunan kurikulum bisa saja terimbas oleh kepentingan politik.

Menurut Guru Besar Emeritus Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, HAAR Tilaar, kurikulum yang berlaku saat ini harus disederhanakan. Mata pelajaran terlalu banyak diberikan kepada pendidikan dasar dan menengah. Jumlah 17 mata pelajaran di SMA terlalu banyak, sementara pendidikan pertanian dan perikanan masih diterlantarkan, bahkan jurusan pertanian dan

perikanan hanya mencetak orang-orang yang bekerja di bidang jasa; pada hal, kebanyakan penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan.

Melihat komentar para pakar tersebut tentang kurikulum yang ada, kita tidak menemukan secara langsung mata pelajaran budaya. Kurikulum sendiri pada SMA sudah memuat pemisahan bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lain, seperti IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan Matematika. Budaya sebagai satu bidang studi dalam konteks kurikulum tersebut tentu hanya terbaca pada mata pelajaran yang berhubungan dengan kesenian yang dilaksanakan dalam sekolah-sekolah kesenian atau yang berhubungan dengan studi-studi budaya pada perguruan tinggi. Tapi pendidikan budaya dalam terang penerapan kurikulum sebetulnya dimaksudkan proses pembentukan manusia yang berbudaya dalam arti berwatak luhur dan beradab, dan pembentukan manusia seperti itu bisa dicapai dalam jalur studi apa saja. Seorang yang belajar matematika pada saat yang sama bisa mengembangkan watak luhur dan beradab melalui jalur matematika.

Dalam terang pendirian ini, kita boleh mengambil alih konsep kebudayaan Ki Hajar Dewantara tentang cipta, rasa dan karsa, dan kita mengartikan pendidikan budaya sebagai pengembangan kemampuan cipta, rasa dan karsa, atau dalam semangat UUD'45 dan Undang-Undang Pendidikan No. 20, Tahun 2003, pendidikan budaya kita pahami sebagai pembentukan manusia pancasilais, yang beriman (kecerdasan spiritual), yang beretis (watak luhur dan beradab) dan yang berilmu (kecerdasan otak).

Pertanyaan kita ialah bahwa apakah realitas konkrit pendidikan kita pada era reformasi ini sedang berada pada jalur pembentukan manusia Indonesia seperti itu: Beriman, beretika, dan berilmu? Ketika kita menyaksikan korupsi para pejabat dari tingkat pusat sampai daerah (bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif), kita bisa menggeleng-gelengkan kepala menyindir lembaga pendidikan kita yang dituntun oleh begitu banyak kurikulum nasional sesudah kemerdekaan (di dalam masa Orde Baru saja ada 4 kurikulum), dan mereka yang berkorupsi ini justru jeblosan dari penerapan kurikulum tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an dan tahun 90-an. Pada hal, semangat dan tujuan pendidikan nasional tetap sama seperti tertera dalam UUD'45 dan dalam penjabarannya.

5. Budaya Pendidikan dalam Konteks Indonesia Kini

Budaya pendidikan sudah kita artikan sebelumnya. Budaya pendidikan adalah praktek pendidikan itu sendiri. Pada bagian ini kita mencoba menganalisa praktek pendidikan pada era reformasi ini. Kita meneropongnya dengan berpijak

pada fakta empiris yang memberi gambaran tentang praktek pendidikan kita. Ketika menulis makalah tentang "*State of the Arts Teori Konstruksi Sosial*" pada semester pertama program S3 Ilmu Sosial di Universitas Airlangga, Surabaya, penulis menemukan satu hal yang menarik dalam artikel Endang Sriningsih "*Teori Sosial Construction of Reality Peter L. Berger dan Thomas Luckman*" dalam buku "*Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*" yang dieditkan oleh Bagong Suyanto dan M. Khusna Amal. Buku itu diberi kata pengantar oleh Profesor Ramlan Surbakti. Hal yang menarik itu adalah perbuatan JIPLAK (PLAGIAT) yang dilakukan oleh Endang Sriningsih.

Pada halaman 144 dalam buku yang dieditkan oleh Bagong Suyanto dan M. Khusna Amal, seluruh alinea yang berawal dengan kalimat "*Sosiologi pengetahuan lahir dalam situasi khusus....., bahkan di mana sudah ada minat terhadap disiplin itu*" adalah JIPLAKAN dari Buku Terjemahan "*Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*", Peter L. Berger – Thomas Luckmann, Pengantar: Frans M. Parera, Jakarta: Penerbit LP3S, 1990, halaman: 5. Penulis Endang Sriningsih tidak memberi catatan (Endang Sriningsih, 2010:144).

Kalimat-kalimat dalam alinea tersebut diambil langsung dari buku terjemahan ini. Kasus seperti ini yang sempat diketahui publik menimpa juga seorang profesor pada Universitas Parahyangan, Bandung, dan seorang profesor lain pada Universitas Pekanbaru. Sarana modern seperti internet memungkinkan dosen atau mahasiswa dengan mudah mengambil langsung tulisan dari dalam internet atau dari sumber lain lewat media komputer secara harafiah dan menjadikannya sebagai tulisannya sendiri. Praktek pendidikan dewasa ini sangat kuat dipengaruhi oleh mentalitas instan (mentalitas yang mencapai hasil segera dan cepat tanpa kerja keras). Jiplakan tentu merupakan produk juga dari mentalitas instan ini.

Fakta empiris lain dapat kita angkat dari pengalaman mahasiswa terhadap praktek belajar-mengajar pada perguruan tinggi. Seorang Suster Katolik belajar pada salah satu Universitas di kota Malang. Ketika ada ujian tulisan, suster sendiri yang mengikuti ujian mata kuliah itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mahasiswa/i yang lain "menyontek" dengan jalan membuka buku catatan tentang tema yang ditanya, meskipun ada aturan bahwa orang tidak boleh menyontek.

Banyak kasus lain tentang ujian tulisan pada EBTANAS SD, SMP dan SMA menunjukkan bahwa kunci jawaban sudah dibagi secara tersembunyi kepada murid sebelum saat ujian. Begitu juga ada soal tentang kedisiplinan belajar-mengajar. Mahasiswa mengalami kesulitan untuk bertemu dan

berkonsultasi dengan dosen. Dosen selalu punya alasan untuk tidak hadir dalam kuliah pada waktunya tanpa memberitahukan pembatalan itu kepada mahasiswa jauh sebelumnya. Tidak ada jam bicara para dosen yang diatur oleh perguruan tinggi; juga mata kuliah-mata kuliah pada semester tertentu tidak diatur jelas jauh sebelum dimulainya semester. Dan ada banyak hal lain lagi yang bisa diteropong, bila kita berbicara tentang kedisiplinan belajar-mengajar pada perguruan tinggi. Tidaklah heran bahwa pendidikan kita di Indonesia dalam praksis bukan untuk menghasilkan manusia yang beriman, beretika dan berilmu, tapi menjadi ajang untuk pertunjukan dan praktek kekuasaan.

Kita mengarahkan perhatian kita juga ke dunia pasar dan bisnis yang sedang menguasai proses penyelenggaraan pendidikan kita. *Kompas, Senin 11 Juli 2011* memberitakan bahwa biaya masuk ke perguruan tinggi nasional hanya terjangkau oleh mahasiswa dari keluarga yang mampu. Dari survey Kompas, 94% mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi berasal dari keluarga mampu. Itu berarti bahwa perguruan tinggi nasional kita hanya dihuni oleh mahasiswa dari kelas menengah ke atas; pada hal, perguruan tinggi diperuntukkan bagi semua anak bangsa.

Contoh kasus boleh kita angkat dari pengalaman orang tua terhadap Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Banyak orang tua meminta keringanan biaya SPMA (Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik) pada Universitas Gajah Mada. Turmuzi, salah seorang pengeluh, menceritakan pengalamannya bahwa anaknya diterima di UGM pada fakultas Ilmu Keperawatan Gigi setelah lolos sileksi, tetapi untuk memulai kegiatan perkuliahan, dia harus membayar SPMA sebesar Rp.35 juta; sumbangan Pembinaan Pendidikan Rp. 500.000 per semester; biaya operasional pendidikan (BOS) Rp. 1.275 juta; biaya lain-lain Rp. 350.000. Total seluruhnya pada awal semester berjumlah Rp. 37.12 juta. Bapa ini merasa terlalu berat untuk pembayaran sekaligus dan meminta keringanan untuk bercicil membayarnya. Sementara itu, di sana sini masih terdapat pungutan liar.

Biaya pendidikan di perguruan tinggi dan kasus pengalaman orang tua tersebut hanyalah salah satu kasus dari sekian banyak modus pengalaman yang menempatkan lembaga-lembaga pendidikan dan praktek penyelenggaraannya ke bawah hukum-hukum pasar dan bisnis. Hukum pasar dan bisnis adalah hukum kapitalis yang memanfaatkan sektor pendidikan sebagai medan pencari untung dan per kaya diri. Tuntutan biaya yang tinggi pada awal semester setelah lolos sileksi bila dipenuhi oleh peserta didik akan menanamkan sikap dan pendirian bahwa si peserta didik yang bersangkutan akan mengembalikan biaya besar itu dengan cara berbisnis juga pada instansi kerjanya setelah lulus dan mendapat profesinya. Dalam studi-studi budaya, praktek dan proses pengelolaan

pendidikan yang berorientasi pada pasar dan bisnis mencerminkan apa yang disebut "budaya Kapitalis" (Sandi, 2011:199-202).

Melalui beberapa fakta yang kita kemukakan itu, kita boleh menyimpulkan bahwa budaya pendidikan kita memperlihatkan mutu (kualitas) yang rendah dalam penyelenggaraan dan praktek pendidikannya (Muhammad Rifai, 2011:147). Berdasarkan laporan HDI (Human Development Indeks) yang dilakukan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*), Indonesia menempati urutan ke 110 dari 117 negara di bidang pendidikan. Indonesia berada di bawah urutan Vietnam (urutan 108 dari 117); Filipina (84 dari 117); Thailand (73 dari 117); Malaysia (61 dari 117), Brunei (33 dari 117) dan Singapura (25 dari 117). Di antara sesama anggota ASEAN, Indonesia menempati urutan yang paling rendah.

Ungkapan "Budaya Pendidikan" sebetulnya tidak layak untuk dikenakan pada kualitas semacam itu, karena kata "budaya" identik dengan "peradaban", bila kita menjatuhkan penilaian moral atas bidang itu, yaitu penilaian baik-tidaknya, maju-mundurnya atau berkenan-tidak berkenannya satu kebudayaan. Peradaban menunjukkan keadaan maju satu kebudayaan, yang dicirri oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, tingginya tingkat kesejahteraan hidup dan keamanan serta kestabilan tata tertib hidup masyarakat. Tetapi "budaya" memang berbeda dengan "peradaban" (*civilization*). Konsep "budaya" bersifat netral; artinya, tidak perlu adanya penilaian moral atasnya. Budaya menunjuk kepada keadaan apa adanya masyarakat dalam hal cipta, rasa dan karsa masyarakat tersebut.

Budaya pendidikan yang adalah praktek dan penyelenggaraan pendidikan untuk konteks Indonesia dewasa ini tercermin dalam kemampuan cipta, rasa dan karsa manusia Indonesia untuk menggumuli pendidikan di Indonesia, dan hal ini berarti bahwa praktek dan penyelenggaraan pendidikan harus dijiwai (kemampuan karsa) oleh kemampuan rasional (cipta) untuk mengelola pendidikan dan oleh kekuatan disipliner (rasa) untuk mengatur pengelolaannya.

6. Simpulan

Pendidikan Budaya dan Budaya Pendidikan yang disoroti dalam makalah ini memiliki kekhasan pemahaman tentang arti konsepnya. Pendidikan Budaya menekankan proses pengenalan, pelestarian dan pengembangan apa yang menjadi wujud budaya: gagasan-gagasan; aktivitas manusia; benda-benda hasil karya manusia. Sementara itu, Budaya Pendidikan berpusat pada praktek dan penyelenggaraan pendidikan.

Baik Pendidikan Budaya maupun Budaya Pendidikan diteropong dalam konteks Indonesia pada era reformasi. Pendidikan Budaya di Indonesia dijalankan dalam usaha untuk membentuk manusia Indonesia yang bersifat Pancasila, yaitu manusia Indonesia yang beriman, beretika dan berilmu. Budaya Pendidikan di Indonesia menunjukkan praktek dan penyelenggaraan pendidikan, yang kualitasnya masih rendah, ketika kita berbicara tentang praktek dan penyelenggaraan pendidikan yang penuh dengan cacat dan ketimpangan.

* * * * *

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Chris (2011), *Cultural Studies. Teori & Praktik*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Dewantara, Ki Hajar (2009), *Menuju Manusia Merdeka*. Yogyakarta: Leutika.
- Erikson, Erik H., (2001), *Jati Diri Kebudayaan dan Sejarah. Pemahaman dan Tanggung Jawab*.
- Agus Cremers (Terjemahan dan Pengantar). Ledalero: LPBAJ.
- Freire, Paulo (1999), *Politik Pendidikan. Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: READ (Research, Education and Dialogue).
- Hasan, Sandi Suwardi (2011), *Pengantar Cultural Studies*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hefner, Robert W. (2009), *Islamic Schools, Social Movements, and Democracy in Indonesia*. Dalam: *Making Modern Muslims. The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Robert W. Hefner (Ed.). Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Klostermaier, Klaus K. (1994), *A Survey of Hinduism*. New York: State University of New York Press.
- Kompas, Senin, 11 Juli 2011.
- Kompas, Selasa, 4 September 2012.
- Perry, Edward Delavan (1990), *A Sanskrit Primer*. Delhi: Low Price Publications.
- Print C.M., Drs., dkk, (1969), *Kamus Latin-Indonesia*. Semarang: Penerbitan Yayasan Kanisius.

- Rahardjo, Suparto (2010), *Ki Hajar Dewantara. Biografi Singkat 1889-1959*. Jogjakarta: Garasi House of Book.
- Rifai, Muhammad (2011), *Politik Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rohman, Muhammad, M. Pd., (2012), *Kurikulum Berkarakter. Refleksi dan Proposal Solusi Terhadap KBK dan KTSP*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sriningsih, Endang (2010), *Teori Social Construction of Reality Peter L. Berger dan Thomas Luckman*. Dalam: *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Bagong Suyanto & M. Khusna Amal. Malang: Aditya Media Publishing, bdk. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Peter L. Berger – Thomas Luckmann (1990). Pengantar: Frans M. Parera. Jakarta: Penerbit LP3S.
- Tilaar, H. A. R., Prof., Dr., M. Sc. Ed., (1999), *Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.